LAPORAN HASIL ANALISIS SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPKP DAN SPAK) BULAN JULI 2026

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR. DAN ZAT ADIKTIF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **4**

DAFTAR TABEL **4**

BAB I **5**

PENDAHULUAN **5**

A. Latar Belakang 5

B. Tujuan 6

C. Dasar Hukum 6

D. Survei dan Kuesioner Survei 6

BAB II **7**

METODOLOGI SURVEI **7**

A. Kriteria Responden 7

B. Metode Pencacahan 7

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis 7

a. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan meliputi pertanyaan sebagai berikut: 7

b. Survei Persepsi Anti Korupsi terdiri dari 5 (lima) pertanyaan adalah sebagai berikut: 8

BAB III **9**

PENGOLAHAN SURVEI **9**

A. Analisis Hasil Survei 9

B. Rencana Tindak Lanjut 19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV 20

DATA SURVEI 20

A. Data Responden 20

B. Data Pendukung Lainya (Pelaksanaan) 20

BAB V 22

PENUTUP 22

A. Kesimpulan 22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Gender Responden Survei SPKP-SPAK Juli 2026 9
Gambar 2. Profil Umur Responden Survei SPKP-SPAK Juli 2026.....9
Gambar 3. Profil Pendidikan Responden SPKP-SPAK Juli 2026.....10
Gambar 4. Profil Jenis Usaha Responden SPKP-SPAK Juli 2026.....10
Gambar 5. Tren Per Unsur Hasil SPKP dari Januari 2026 sd Juli 2026.....12
Gambar 6. Tren per Unsir Hasil Survei SPAK Januari 2026 sd Juli 2026 17
Gambar 7. Survei Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) bulan Juli 2026 20
Gambar 8. Survei Pengukuran Persepsi Antikorupsi (SPAK) bulan Juli 2026.....21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Interval Konversi SPKP dan SPAK.....8
Tabel 2. Hasil SPKP Bulan Juli 2026 11
Tabel 3. Indeks PKP Tahun 2021 s.d Juli 2026.....16
Tabel 4. Hasil SPAK Bulan Juli 2026 17
Tabel 5. Indeks PAK Tahun 2021 s.d Juli 2026.....18
Tabel 6. Data Responden survei SPKP dan SPAK bulan Juli 2026 20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja. Program-program Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan akuntabel, dengan salah satu pengukuran melalui Nilai persepsi anti korupsi (survei eksternal) atau Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan salah satu pengukuran melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) dengan output Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang memberikan gambaran kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja berdasarkan persepsi pengguna layanan).

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA telah melakukan survei terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Laporan ini disusun sebagai publikasi, analisis, serta tindak lanjut perbaikan terhadap hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif periode bulan Juli 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tujuan

1) Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan (PKP) yang memberikan gambaran kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah.
2) Pengukuran Persepsi Anti Korupsi (PAK) yang penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi di instansi berdasarkan persepsi pengguna layanan.

C. Dasar Hukum

1) PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah
2) Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas
3) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

D. Survei dan Kuesioner Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bulan Januari 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan surat Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.01.26.13 tanggal 30 Januari 2026. Pelaksanaan survei dilaksanakan melalui tautan yang disampaikan kepada pengguna layanan yang telah selesai mengakses layanan 100% dengan tautan berikut https://bit.ly/skmahpnpp, https://bit.ly/skmskiobat dan https://bit.ly/skm_iklanobat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden yang dipilih adalah penerima layanan Surat Keterangan Impor (SKI), Analisis Hasil Pengawasan (AHP), dan Persetujuan Iklan Obat yang telah menerima layanan 100% pada bulan Juli 2026.

B. Metode Pencacahan

Metode pencacahan dalam pelaksanaan SPKP dan SPAK di lingkungan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Ditwas KMEI ONAPPZA) dilakukan melalui ***self-administered survey*** berbasis **kuesioner digital**. Responden mengisi kuesioner secara mandiri melalui *platform daring* (website atau aplikasi survei), tanpa interaksi langsung dengan petugas survei.

Pendekatan ini dipilih untuk menjamin **objektivitas jawaban**, meningkatkan **kenyamanan responden**, serta meminimalkan potensi bias akibat pengaruh pewawancara (*interviewer bias*). Selain itu, metode digital memungkinkan jangkauan responden yang lebih luas, efisiensi waktu pengumpulan data, serta kemudahan dalam pengolahan dan analisis data secara real-time.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

a. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan meliputi pertanyaan sebagai berikut:
   1) Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?
   2) Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
   3) Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?
   4) Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?
   5) Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?

6) Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?
7) Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik?
8) Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?

b. Survei Persepsi Anti Korupsi terdiri dari 5 (lima) pertanyaan adalah sebagai berikut:
   1) Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi
   2) Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan.
   3) Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang
   4) Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)
   5) Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Penilaian dengan skala 1-6, dengan 1 merupakan nilai terendah dan 6 merupakan nilai tertinggi.

Pada tahap interpretasi, untuk penafsiran hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004 indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Interval Konversi SPKP dan SPAK

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	B	Baik
4	3,26-4,00	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

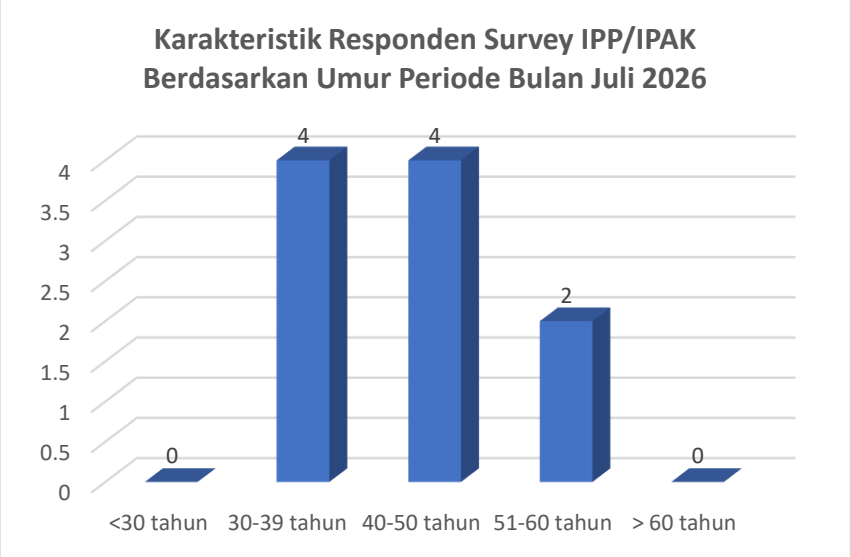
1. Responden

Total responden yang mengisi survei bulan Juli 2026 adalah sejumlah 10 (sepuluh) responden yang berasal dari Industri Farmasi, Perusahaan kesehatan, Pedagang Besar Farmasi dan wiraswasta dengan rincian responden sesuai dengan lampiran Responden merupakan pelaku usaha yang menerima pelayanan 100% terkait AHP, SKI, CPP atau Iklan Obat.



Gambar 1. Profil Gender Responden Survei SPKP-SPAK Juli 2026

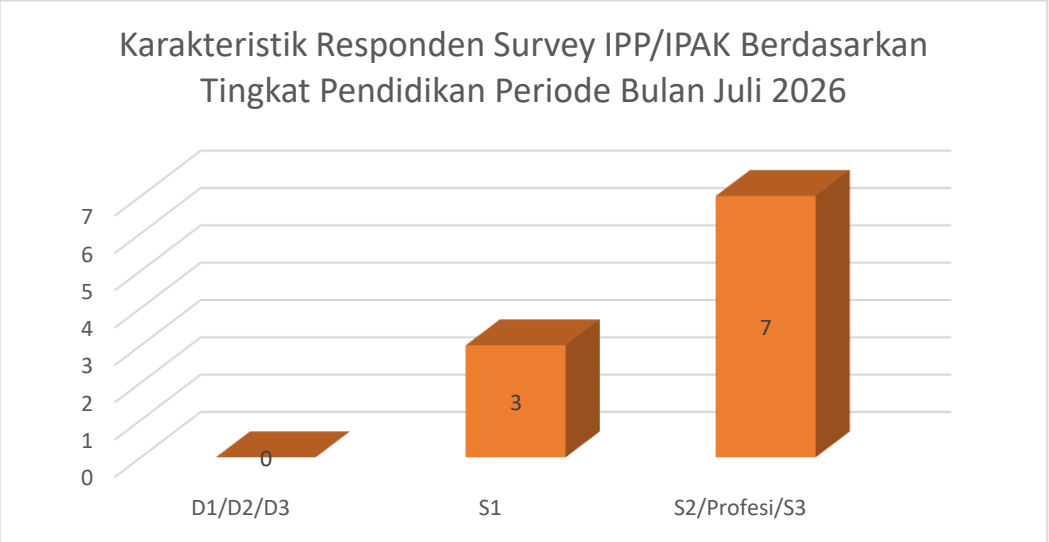
Jumlah responden didominasi oleh perempuan yaitu 7 responden yang mencapai 70,00% dari total responden, dibandingkan responden laki-laki sejumlah 3 responden (30,00%).



Gambar 2. Profil Umur Responden Survei SPKP-SPAK Juli 2026

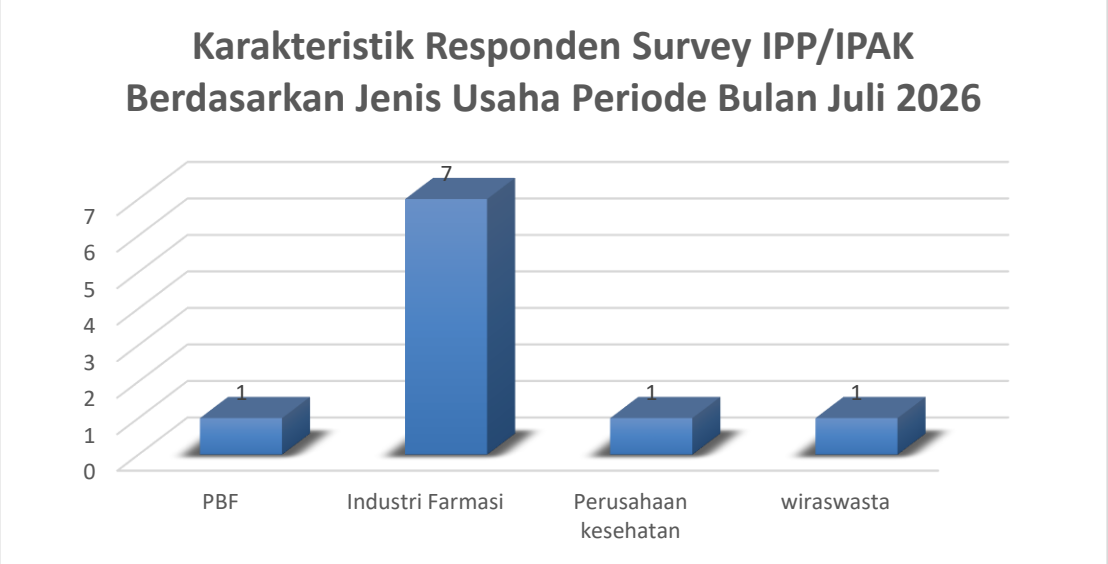
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data, responden yang melakukan pengisian survei dari berbagai kelompok usia, dengan rata-rata usia responden adalah 43 tahun. Pada periode ini, umur responden berada pada rentang umur 30-39 tahun dan 40-50 tahun sejumlah 8 respon. Hal tersebut menunjukkan pelaku usaha yang menerima layanan Ditwas KMEIONAPPZA merupakan usia produktif dan tidak ada usia kelompok rentan (lansia > 60 tahun).



Gambar 3. Profil Pendidikan Responden SPKP-SPAK Juli 2026

Berdasarkan data diketahui penerima layanan bulan Juli 2026 adalah dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2/Profesi/S3. Mayoritas 7 responden (70%) berlatar belakang pendidikan S2/Profesi/S3. Sejumlah 3 responden dengan pendidikan S1.



Gambar 4. Profil Jenis Usaha Responden SPKP-SPAK Juli 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari Gambar 4 diketahui bahwa jumlah responden survei mayoritas berasal Industri Farmasi, yaitu sebanyak 7 responden.

2. Hasil Survei

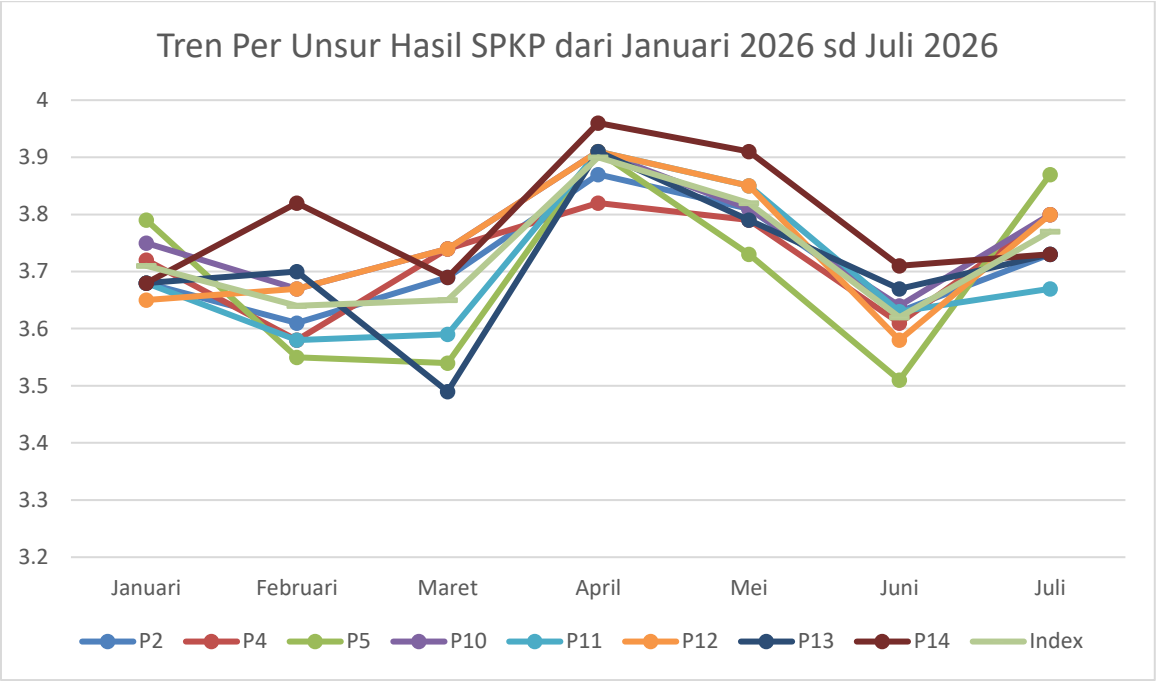
a. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) merupakan gambaran kualitas pelayanan publik di suatu Unit Kerja berdasarkan persepsi pengguna layanan. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan meliputi Prosedur Layanan, Waktu Layanan, Respon/Kecepatan Petugas, Penanganan Pengaduan, Persyaratan Pelayanan, Sarana/Prasarana, Informasi Pelayanan, Tarif/Biaya. Indeks Persepsi dikonversikan dengan skala 1 (satu) hingga 4 (empat), dengan skala 1 menggambarkan indeks pelayanan publik yang tidak baik dan skala 4 adalah indeks pelayanan publik yang sangat baik.

Tabel 2. Hasil SPKP Bulan Juli 2026

No	Unsur	Indeks Juni 2026	Indeks Juli 2026	Selisih
U1	Prosedur Layanan	3,63	3,73	+0,10
U2	Waktu Layanan	3,61	3,80	+0,19
U3	Responsibilitas	3,51	3,87	+0,36
U4	Penanganan Pengaduan	3,64	3,80	+0,16
U5	Sarana/Prasarana	3,63	3,67	+0,04
U6	Persyaratan pelayanan	3,58	3,80	+0,22
U7	Informasi Pelayanan	3,67	3,73	+0,06
U8	Tarif/Biaya	3,71	3,73	+0,02
Rata-Rata		**3,65**	**3,77**	**+0,12**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 5. Tren Per Unsur Hasil SPKP dari Januari 2026 sd Juli 2026

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Ditwas KMEI ONNPZA bulan Juli 2026 adalah 3,77 dengan kategori nilai PKP termasuk dalam kategori “A” atau “Sangat Baik”. Setiap komponen unsur juga memiliki kategori sangat baik dengan urutan tertinggi dengan nilai 3,87 adalah Responsibilitas dan terendah dengan nilai 3,67 yaitu Sarana/Prasarana.

Terdapat kenaikan nilai hasil survei pada bulan Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026 (3,62). Seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dibandingkan Juni 2026 dengan nilai kenaikan terbesar ada pada unsur Responsibilitas sebesar 0,36 poin. Secara umum, seluruh unsur penilaian memiliki kategori “Sangat Baik”.

Unsur Indeks pelayanan publik yang mendapatkan penilaian **terendah** dari penerima layanan Ditwas KMEI ONAPPZA ada 2 yaitu sebagai berikut :

1) **Sarana/Prasarana (U5) = [3,67]**
   i. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

ii. Nilai indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin dibanding Juni 2026.

iii. Ditwas KMEIONAPPZA akan secara berkala melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana untuk dapat menunjang terlaksananya pelayanan prima.

2) Prosedur Pelayanan (U1); Informasi Pelayanan (U7) dan Tarif/Biaya (U8) = [3,67]

i. Unsur prosedur layanan menunjukkan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

ii. Prosedur pelayanan untuk layanan AHP, SKI, CPP, dan Persetujuan Iklan Obat bulan Juni 2026 sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditwas KMEIONAPPZA Nomor HK.02.02.35.05.26.52 tahun 2026.

iii. Prosedur pelayanan telah disosialisasikan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Ditwas KMEIONAPPZA dimana pada kegiatan tersebut mengundang stakeholder terkait untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan Ditwas KMEIONAPPZA. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi pelayanan kepada pengguna layanan. Ditwas KMEIONAPPZA juga secara berkala melakukan tinjauan terhadap prosedur layanan sesuai dengan perkembangan terkini. Prosedur layanan juga telah disosialisasikan melalui media sosial resmi Ditwas KMEIONAPPZA juga secara berkala melakukan tinjauan terhadap prosedur layanan sesuai dengan perkembangan terkini.

iv. Terdapat kenaikan nilai indeks sebesar 0,1 poin dibandingkan hasil survei Juni 2026.

v. Informasi pelayanan adalah informasi terkait pelayanan yang dapat diakses oleh penerima layanan.

vi. Ditwas KMEIONAPPZA senantiasa terus melakukan sosialisasi terkait informasi pelayanan melalui berbagai kanal media

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Ditwas KMEIONAPPZA Tahun 2026 telah terlaksana pada tanggal 30 April 2026. Pada kegiatan ini Ditwas KMEIONAPPZA melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2026 dan menjaring masukan dari berbagai stake holder termasuk pelaku usaha.

vii. Secara umum, berdasarkan hasil survei, pelanggan menyampaikan apresiasi terhadap informasi pelayanan yang disampaikan oleh petugas karena telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

viii. Terdapat kenaikan nilai indeks pada unsur Informasi Pelayanan sebesar 0,06 poin dari hasil survei bulan Juni 2026.

ix. Unsur Tarif/biaya menggambarkan sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh penerima layanan terkait jenis layanan yang diajukan seperti persetujuan iklan obat, layanan SKI, AHP, dan CPP.

x. Tarif/biaya tersebut telah disosialisasikan dan dapat diunduh melalui website Ditwas KMEIONAPPZA. Ditwas KMEIONAPPZA juga secara berkala melakukan tinjauan terhadap tarif/biaya yang harus dipenuhi oleh penerima layanan sesuai dengan perkembangan terkini.

xi. Nilai indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin dibanding Juni 2026.

Sedangkan unsur indeks pelayanan publik yang mendapatkan penilaian **tertinggi** dari penerima layanan Ditwas KMEIONAPPZA adalah sebagai berikut:

1) Responsibilitas (U3) = [3.87]

i. Responsibiltas menggambarkan respon petugas layanan terhadap keperluan pelanggan.

ii. Ditwas KMEIONAPPZA telah membuka berbagai kanal komunikasi untuk merespon keperluan pelanggan antara lain melalui pertemuan tatap muka yang dilakukan sepanjang jam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kerja di gedung Athena lantai 4 (loket S1 dan S2), serta layanan secara online melalui whatsapp, telepon, dan email.

iii. Secara umum, berdasarkan hasil survei, pelanggan juga menyampaikan apresiasi terhadap kecepatan respon petugas dalam memberikan layanan serta kemudahan berinteraksi dan berkomunikasi dengan petugas layanan/evaluator.

iv. Nilai indeks ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,36 poin dibanding Juni 2026 (3.51).

2) Waktu layanan (U2); Penanganan Pengaduan (U4) dan Persyaratan Pelayanan (U6) = [3,80]

i. Unsur waktu layanan menggambarkan jangka waktu penyelesaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit layanan.

ii. Nilai indeks unsur waktu layanan bulan Juli 2026 mengalami kenaikan 0,19 poin dibandingkan dengan Juni 2026.

iii. Secara umum waktu penyelesaian telah memenuhi janji layanan dan hal ini menunjukkan komitmen petugas untuk menyelesaikan layanan tepat waktu.

iv. Penanganan pengaduan adalah tindakan yang diambil untuk menangani aduan baik yang berupa kritik/saran maupun laporan terkait layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

v. Nilai indeks penanganan pengaduan mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dibandingkan dengan Juni 2026.

vi. Ditwas KMEIONAPPZA terus melakukan peningkatan penanganan terhadap aduan yang masuk khususnya terkait pelayanan publik dari berbagai kanal pengaduan baik secara luring ataupun daring untuk mendukung terlaksananya pelayanan prima.

vii. Persyaratan pelayanan menggambarkan informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan.

viii. Persyaratan pelayanan tersebut telah disosialisasikan dan dapat diunduh melalui website dan berbagai kanal media

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi Ditwas KMEIONAPPZA. Ditwas KMEIONAPPZA juga secara berkala melakukan tinjauan terhadap prosedur layanan sesuai dengan perkembangan terkini.

ix. Nilai indeks unsur Persyaratan Pelayanan mengalami kenaikan 0,22 poin dibanding Juni 2026.

Tabel 3. Indeks PKP Tahun 2020 s.d Juli 2026

No.	Tahun	Indeks PAK
1	2020	3,61
2	2021	3,63
3	2022	3,63
4	2023	3,64
5	2024	3,65
6	2025	3,70
7	Januari 2026	3,71
8	Februari 2026	3,64
9	Maret 2026	3,65
10	April 2026	3,90
11	Mei 2026	3,82
12	Juni 2026	3,62
13	Juli 2026	3,77

Secara keseluruhan hingga Juli 2026, terdapat peningkatan Indeks PKP dari tahun 2025 yaitu 3,70 menjadi 3,77 di Juli 2026. Nilai IPKP 2026 bulan Juli 2026 yang diperoleh Ditwas KMEIONAPPZA masih memenuhi target pelayanan prima.

a. Survei Pengukuran Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Survei Pengukuran Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi diskriminasi, kecurangan, penerimaan imbalan/gratifikasi, pungutan liar (pungli), percaloan.

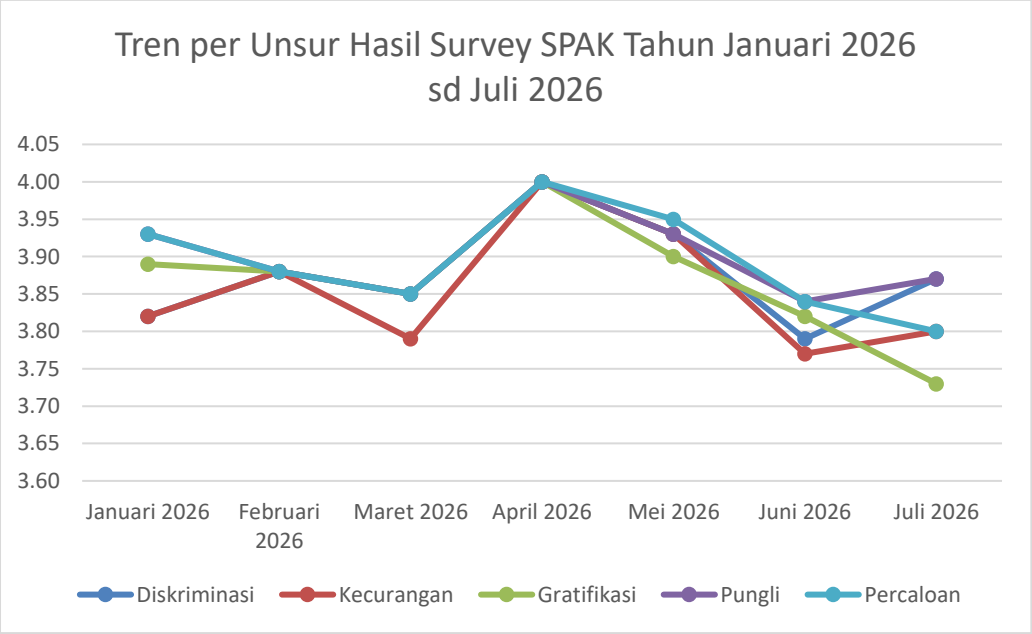
Indeks Persepsi diukur menggunakan skala 1 (satu) hingga 4 (empat), dengan skala 1 menggambarkan persepsi anti korupsi yang rendah (tidak baik) dan skala 4 adalah persepsi anti korupsi yang tinggi (sangat baik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. Hasil SPAK Bulan Juli 2026

No	Unsur	Indeks Maret 2026	Indeks April 2026	Selisih
1	Diskriminasi	3,79	3,87	+0,08
2	Kecurangan	3,77	3,80	+0,03
3	Gratifikasi	3,82	3,73	-0,09
4	Pungli	3,84	3,87	+0,03
5	Percaloan	3,84	3,80	-0,04
Rata-Rata		**3,84**	**3,81**	**-0,03**

Berdasarkan survei persepsi anti korupsi yang dilaksanakan pada Juli 2026, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Ditwas KMEIONAPPZA mendapat skor skor 3,81 poin. Hasil survei ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan hasil survei bulan Juni 2026.



Gambar 6. Tren per Unsir Hasil Survei SPAK Januari 2026 sd Juli 2026

Hasil penilaian SPAK pada bulan Juli 2026 yaitu 3,80 tidak mengalami kenaikan sama dengan bulan Juni 2026. Semua unsur pada bulan April 2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada bulan Maret 2026. Hasil survei dengan nilai tertinggi ada pada unsur Diskriminasi dan Pungli dengan nilai yang sama yaitu 3,87 poin. Dan yang terendah adalah unsur Gratifikasi mendapatkan nilai 3,73 poin, mengalami penurunan 0,09 dari bulan Juni 2026. Unsur Percaloan mengalami penurunan sebesar 0,04 poin.

Pengukuran Persepsi Anti Korupsi (PAK) penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi berdasarkan persepsi pengguna layanan. Pada Juli 2026, persepsi antikorupsi Ditwas KMEIONAPPZA berada dalam kategori “A” atau “Sangat Baik”, termasuk seluruh unsur komponennya.

Tabel 5. Indeks PAK Tahun 2020 s.d Juli 2026

No.	Tahun	Indeks PAK
1	2020	3,79
2	2021	3,78
3	2022	3,80
4	2023	3,83
5	2024	3,81
6	2025	3,86
7	Januari 2026	3,89
8	Februari 2026	3,88
9	Maret 2026	3,84
10	April 2026	4,00
11	Mei 2026	3,93
12	Juni 2026	3,81
13	Juli 2026	3,81

Terdapat penurunan Indeks PAK dari tahun 2025 dari 3,86 menjadi 3,81 di Juli 2026. Hasil IPAK Juli 2026 Ditwas KMEIONAPPZA telah memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan komponen SPKP adalah berikut:
   a. Petugas pelayanan publik Ditwas KMEIONAPPZA telah mengikuti pelatihan pelayanan publik prima dan kelompok rentan guna meningkatkan soft skill dan responsibilitas dalam memberikan pelayan publik yang prima.
   b. Ditwas KMEIONAPPZA terus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi dan mengirimkan pemberitahuan kepada pelaku usaha apabila terdapat kendala sistem.
   c. Ditwas KMEIONAPPZA perlu secara rutin melakukan sosialisasi dan memberikan informasi pelayanan publik dan persyaratan pelayanan yang dapat diunduh melalui website dan berbagai kanal media informasi Ditwas KMEIONAPPZA.
   d. Ditwas KMEIONAPPZA perlu terus berupaya menyediakan kelengkapan prasarana dan kecukupan anggaran untuk mendukung pelayanan prima di Gedung Athena BPOM yang telah disesuaikan dengan standar penilaian Unit Pelayanan Publik.
   e. Sosialisasi berkala kepada pelaku usaha terkait upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan Badan POM direncanakan akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai stakeholder termasuk pelaku usaha..
2. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan komponen SPKP dan SPAK adalah dengan penguatan melalui inovasi SAHABAT (Sinergi Advokasi, Harmonisasi, dan Bimbingan Teknis) yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses konsultasi yang akan diserlenggarakan tiap caturwulan melalui zoom serta kolaborasi dengan tim kerja Reformasi Birokrasi terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

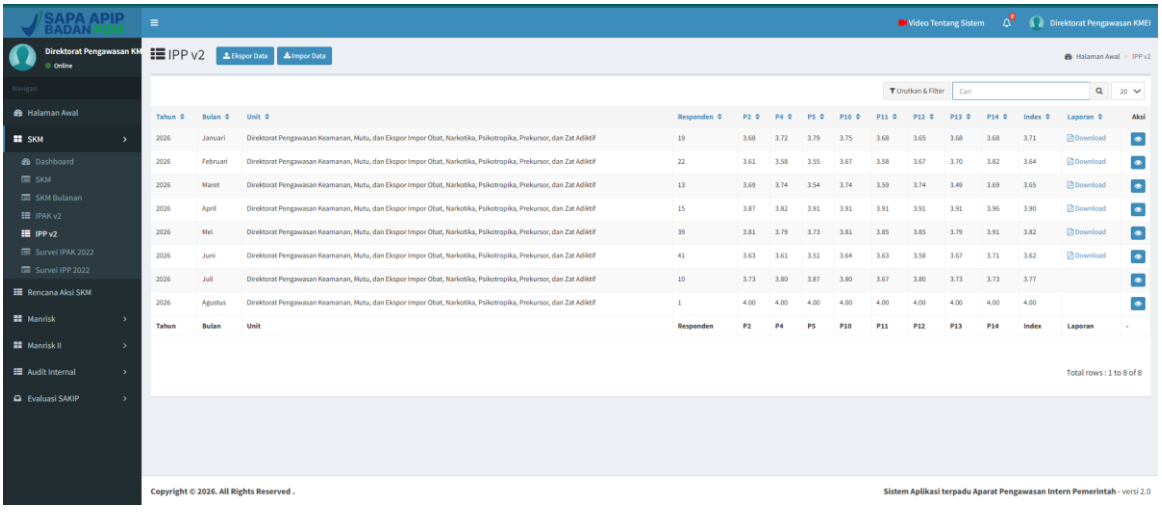
Berikut data responden yang mengisi survei Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Pengukuran Persepsi Antikorupsi (SPAK) Ditwas KMEIONAPPZA bulan Juli 2026 :

Tabel 6. Data Responden survei SPKP dan SPAK bulan Juli 2026

No.	Nama	No. Handphone
1	[redacted]	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

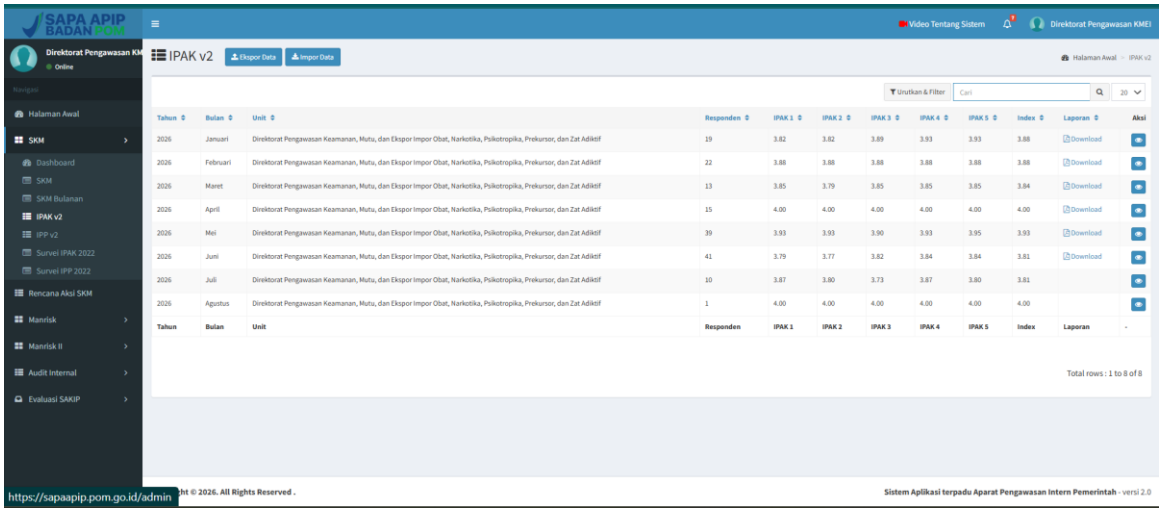
B. Data Pendukung Lainya (Pelaksanaan)

Data pendukung lainnya berupa hasil survei Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Pengukuran Persepsi Antikorupsi (SPAK) Ditwas KMEIONAPPZA pada bulan Juli 2026 pada aplikasi SAPAAPIP



Gambar 7. Survei Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) bulan Juli 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 8. Survei Pengukuran Persepsi Antikorupsi (SPAK) bulan Juli 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Survei Pengukuran Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) Ditwas KMEIONAPPZA pada bulan Juli 2026 adalah 3,77. Secara keseluruhan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Juli 2026** mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 yaitu **dari 3,70 pada 2025 menjadi 3,77 di Juli 2026**. Kategori nilai untuk IPKP Ditwas KMEIONAPPZA tahun 2026 bulan Juli masih termasuk dalam **kategori "A" atau "Sangat Baik".**
2. Survei Pengukuran Persepsi Antikorupsi (SPAK) Ditwas KMEIONAPPZA bulan Juli 2026 adalah 3,81. Secara keseluruhan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Juli 2026** mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yaitu **dari 3,86 pada 2025 menjadi 3,81 di Juli 2026.** Kategori nilai untuk IPAK Ditwas KMEIONAPPZA tahun 2026 bulan April termasuk dalam **kategori "A" atau "Sangat Baik".**
3. Seluruh unsur dan rata-rata unsur SPKP dan SPAK Ditwas KMEIONAPPZA pada bulan Juli 2026 telah memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Nova Emelda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).